

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia mendasarkan sistem pemerintahannya pada prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, yang menekankan pada nilai-nilai dasar Pancasila sebagai landasan ideologis bangsa. Konsep demokrasi Pancasila ini tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai kerangka dasar pemerintahan, dengan penekanan kuat pada partisipasi aktif masyarakat dalam pengaturan urusan pemerintahan. Dalam implementasinya, Indonesia menjalankan sistem demokrasi melalui pemilihan umum langsung, yang memprioritaskan nilai-nilai utama seperti kebebasan, partisipasi aktif warga, kesetaraan, dan perlakuan yang sama bagi semua individu dalam proses demokrasi. Pemilihan umum yang diadakan secara langsung menegaskan komitmen untuk menghormati hak partisipasi dan kesetaraan dalam memberikan suara serta menentukan pemimpin. Sistem demokrasi ini turut melibatkan masyarakat dalam berbagai tahapan, mulai dari pengambilan keputusan hingga pembentukan kebijakan. Proses ini memastikan bahwa kepentingan dan aspirasi masyarakat tercermin dalam keputusan-keputusan pemerintahan serta kebijakan yang dibuat. Namun, pada masa Orde Baru, Indonesia menjalankan sistem pemerintahan yang cenderung sentralistik, di mana segala keputusan penting diambil oleh pemerintah pusat.

Sentralistik mengacu pada sistem di mana kekuasaan dan pengambilan keputusan terpusat pada pemerintah pusat atau otoritas sentral. Dalam konteks pemilu, sentralistik berarti bahwa pengelolaan dan pengawasan pemilu dilakukan oleh lembaga pusat, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat nasional, dan keputusan strategis serta pelaksanaan pemilu dikendalikan oleh entitas pusat. Sentralistik dapat memastikan koordinasi yang efisien dan konsistensi dalam seluruh proses pemilu (Jumaeli, 2021). Model pemerintahan ini memberikan pemerintah pusat kendali penuh terhadap berbagai aspek kehidupan negara, termasuk kebijakan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan. Pemerintah daerah pada masa itu memiliki peran yang terbatas dan lebih berfungsi sebagai ekstensi atau cabang dari pemerintah pusat. Kebijakan dan program yang ditetapkan oleh pemerintah pusat harus dijalankan secara seragam di seluruh wilayah Indonesia tanpa banyak ruang untuk variasi atau adaptasi sesuai dengan kebutuhan lokal.

Namun, seiring dengan berakhirnya Orde Baru dan dimulainya era reformasi di awal tahun 2000-an, terjadi perubahan paradigma dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Salah satu perubahan yang signifikan adalah peralihan dari sistem pemerintahan sentralistik menjadi desentralistik. Sistem desentralistik mengacu pada sistem di mana kekuasaan dan pengambilan keputusan didistribusikan ke unit-unit otonom yang lebih lokal. Dalam konteks pemilu, desentralistik berarti bahwa beberapa aspek pemilu dikelola oleh otoritas lokal, seperti Komisi Pemilihan Umum Provinsi (KPUD) atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (KPUD), dan keputusan yang lebih

spesifik, seperti pengaturan tempat pemungutan suara, pemeliharaan daftar pemilih, dan penyelesaian sengketa, dapat didelegasikan ke tingkat yang lebih rendah. Desentralisasi memungkinkan respons yang lebih adaptif terhadap kondisi lokal dan partisipasi aktif masyarakat setempat (Juameli, 2021). Dalam sistem desentralistik, pemerintah pusat membagikan hak dan wewenang yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan di tingkat lokal. Hal ini mencakup Penentuan badan legislatif di Indonesia yang terdiri dari berbagai tingkatan pemerintahan, seperti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota, yang dilakukan secara langsung oleh warga Indonesia mencerminkan transformasi struktural dalam pemerintahan.

Perubahan ini tidak hanya sekadar transformasi struktural dalam pemerintahan, tetapi juga memiliki dampak yang mendalam dalam pembentukan ruang demokrasi yang lebih luas di Indonesia. Sebelumnya, dengan sistem sentralistik, partisipasi masyarakat dalam proses politik terasa terbatas karena keputusan dan kebijakan diambil oleh pemerintah pusat tanpa banyak keterlibatan dari tingkat lokal. Namun, dengan beralih ke sistem desentralistik, masyarakat di daerah memiliki kesempatan lebih besar untuk terlibat langsung dalam proses pembuatan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Selain itu, perubahan ini juga memberikan penghormatan yang lebih besar terhadap hak suara warga dalam menentukan

pemimpin mereka. Dengan adanya pemilihan badan legislatif secara langsung, masyarakat di daerah memiliki hak untuk memilih badan legislatif yang mereka anggap mampu mewakili dan mengurus kepentingan lokal dengan baik. Dengan demikian, penerapan sistem pemerintahan desentralistik tidak hanya memberikan manfaat dalam hal efisiensi dan efektivitas pengelolaan pemerintahan, tetapi juga membawa Indonesia lebih dekat dengan prinsip demokrasi di mana kekuasaan berasal dari rakyat dan untuk rakyat.

Penerapan sistem pemerintahan desentralistik juga memberikan manfaat dalam hal efisiensi dan efektivitas pengelolaan pemerintahan. Karena kebijakan dan program dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal, maka implementasinya pun dapat dilakukan dengan lebih baik dan tepat sasaran. Pemerintah daerah memiliki pengetahuan yang lebih mendalam tentang kondisi, potensi, dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat di wilayahnya, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih responsif dan relevan. Namun, peralihan ke sistem desentralistik juga menimbulkan sejumlah tantangan dan kompleksitas yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa pemerintah daerah mampu mengelola wewenang yang diberikan dengan baik dan bertanggung jawab, tanpa melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Dalam konteks ini, mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang kuat menjadi penting sebagai langkah preventif untuk menghindari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah daerah, terutama sejak Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum legislatif

pertama di Indonesia dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pemilu ini sering dikatakan sebagai pemilu paling demokratis di Indonesia dan dilaksanakan berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1953 pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap. Pemilihan umum ini menjadi momen pertama bagi warga negara di Indonesia dalam melaksanakan pemilihan umum badan legislatif secara langsung. Pemilihan umum badan legislatif khususnya pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi adalah pelaksanaan sistem desentralisasi yang wewenang diserahkan oleh pemerintah pusat untuk pemerintah daerah dalam mengatur dan menjalankan roda pemerintahan di daerah. Pemilihan umum badan legislatif merupakan kiprah politik yang tepat untuk memperoleh komitmen dalam mewujudkan nilai-nilai politik dari kepemimpinan anggota DPRD yang berdimensi hukum, sosial, dan moral. Pada Pemilu 2024, lebih dari 200 juta penduduk Indonesia akan memberikan suaranya, dan strategi komunikasi politik memainkan peran krusial dalam memenangkan pemilihan. Fauzan Sibron, seorang politisi aktif di Provinsi Lampung sukses dalam memenangkan Pemilihan Legislatif (Pileg) Provinsi Lampung. Fauzan Sibron, dari Partai NasDem, berhasil meraih suara tertinggi dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) di Provinsi Lampung yaitu 40.824 suara (kpu.go.id).

Tabel 1.1**Perolehan Suara Fauzan Sibron Tiap Kecamatan**

No.	Kecamatan	Jumlah Suara
1.	Kedaton	752
2.	Sukarame	1.798
3.	Tanjung Karang Barat	4.248
4.	Panjang	1.588
5.	Tanjung karang Timur	4.222
6.	Tanjung Karang Pusat	2.997
7.	Teluk Betung Selatang	2.324
8.	Teluk Betung Barat	1.817
9.	Teluk Betung Utara	2.131
10.	Rajabasa	962
11.	Tanjung Senang	1.310
12.	Sukabumi	2.473
13.	Kemiling	2.631
14.	Labuhan Ratu	1.508
15.	Way Halim	1.514
16.	Langkapura	671
17.	Enggal	1.391
18.	Kedamaian	2.627
19.	Teluk Betung Timur	2.104

20.	Bumi Waras	1.755
Jumlah Akhir		40.824

Sumber: Website KPU

Dalam upaya meraih kemenangan dalam ajang politik pemilihan badan legislatif yaitu pemilihan DPRD Provinsi, strategi komunikasi memainkan peran penting. Strategi ini melibatkan berbagai aspek, mulai dari kampanye hingga interaksi langsung antara calon kandidat dan masyarakat. Selain strategi komunikasi politik, penggunaan media juga menjadi faktor pendukung untuk memperoleh suara pemilih dan menjangkau lebih banyak orang. Dalam proses berkomunikasi, para perancang strategi komunikasi menghadapi berbagai tantangan terkait penggunaan unsur-unsur komunikasi. Tujuan akhir yang ingin dicapai menjadi fokus utama dalam merancang strategi yang efektif.

Menurut Effendy (2017), strategi komunikasi melibatkan pengelolaan sumber daya komunikasi yang ada untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Ini termasuk memanfaatkan batasan komunikasi secara efektif dan merencanakan taktis untuk mencapai hasil yang diharapkan. Peran komunikasi dan media sangatlah penting dalam strategi pemenangan dalam pemilihan umum DPRD Provinsi. Komunikasi memungkinkan calon DPRD Provinsi untuk menyampaikan pesan politik dan mengatur kampanye dengan efektif. Dalam konteks politik, strategi komunikasi memainkan peran utama, terutama dalam pemilihan umum di mana media digunakan untuk mencapai masyarakat dengan pesan-pesan yang relevan.

Sistem demokrasi memberikan kebebasan kepada warga negara untuk memilih pemimpin yang mereka percayai, dan dalam hal ini, komunikasi politik sangatlah penting untuk membentuk strategi-strategi yang dapat mendapatkan dukungan dari masyarakat. Mengikutsertakan masyarakat dalam proses pemilihan umum merupakan langkah yang krusial untuk mencapai tujuan politik yang diinginkan. Pentingnya merancang strategi komunikasi politik yang tepat tidak bisa diabaikan, karena strategi ini memiliki dampak yang signifikan dalam kontes politik. Melalui penelitian tentang strategi komunikasi politik dan penggunaan media, kita dapat menganalisis hubungan antara kemenangan politik, komunikasi, pengaruh media, dan masyarakat, terutama dalam konteks kampanye pemilihan umum DPRD Provinsi.

Pemilihan umum DPRD Provinsi di Indonesia tahun 2024 berlangsung secara serentak pada tanggal 14 Februari 2024. Semua provinsi di Indonesia ikut serta dalam pemilihan ini, termasuk Aceh, Lampung, Bali, Banten, Bengkulu, Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan lainnya. Penghitungan suara dilakukan dari Rabu hingga Kamis, 14-15 Februari 2024, di mana proses ini menjadi momen krusial dalam menentukan hasil akhir dari pemilihan tersebut. Setelah penghitungan suara selesai, dilanjutkan dengan rekapitulasi hasil yang dilakukan dari Kamis, 15 Februari 2024 hingga Rabu, 20 Maret 2024, di mana seluruh data hasil suara dari berbagai tempat pemungutan suara disatukan dan dihitung ulang untuk memastikan keakuratan

dan keabsahan hasil akhir pemilihan (kpu.go.id). Proses rekapitulasi ini membutuhkan waktu yang cukup panjang karena melibatkan pengumpulan dan pengecekan data secara komprehensif demi menjaga integritas dan transparansi dalam proses demokratis pemilihan.

Pemilihan umum DPRD Provinsi Lampung tahun 2024 telah berlangsung, dan KPU Provinsi Lampung telah mengumumkan nama-nama anggota DPRD terpilih di provinsi tersebut. Berdasarkan hasil pleno, perolehan kursi partai politik di DPRD Provinsi Lampung yang tersebar di 8 daerah pemilihan (Dapil) dapat diprediksi. Beberapa calon DPRD Provinsi Lampung dari Dapil 1 Kota Bandar Lampung dan partai politik yang mengusung mereka antara lain Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan 11 calon termasuk Taufik Rahman, Najjiulah Syarif, dan Ahmad Basuki; Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan 11 calon termasuk Rahmat Mirzani Djausal dan Andhika Wibawa Andbika; Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan 11 calon termasuk Kostiana dan Deddy Wijaya Candra; serta Partai Golongan Karya (Golkar) dengan 11 calon termasuk Hartini Soraya dan Drs. Hi. Azwar Yacub. Selain itu ada juga dari partai Nasem yaitu Fauzan Sibron (Pratama, 2024). Meskipun perolehan suara masing-masing calon dan partai politik belum diumumkan secara rinci oleh KPU Provinsi Lampung.

Fauzan Sibron adalah seorang politisi yang memiliki keterlibatan yang signifikan dalam berbagai pemilihan umum di Provinsi Lampung. Dia merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung dan juga menjabat sebagai Wakil Ketua IV DPRD Provinsi tersebut.

Pada Pemilihan Umum 2024, Fauzan Sibron, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Partai Nasdem Lampung, berhasil meraih suara tertinggi dari Dapil 1 Kota Bandarlampung dengan jumlah suara mencapai . Hasil ini terungkap setelah rapat rekapitulasi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung yang menunjukkan bahwa Fauzan Sibron dari Partai Nasdem memperoleh 40.824 suara. Keberhasilan ini menunjukkan peran penting Fauzan Sibron dalam Pemilihan Umum 2024 dan meningkatkan potensinya untuk menduduki kursi DPRD Provinsi Lampung untuk periode 2024-2029. Sebelumnya, Fauzan Sibron juga telah terlibat dalam pemilihan umum sebelumnya, di mana dia menjadi anggota DPRD Provinsi Lampung untuk periode 2019-2024 dan menjabat sebagai Wakil Ketua IV DPRD Provinsi Lampung pada periode tersebut.

Kemenangan Fauzan Sibron dalam pemilihan umum merupakan hasil kerja keras dalam mengatur strategi komunikasi serta penggunaan media dalam berkampanye. Fauzan Sibron dan Partai Nasdem memiliki beberapa strategi yang mereka terapkan untuk memenangkan pemilihan umum. Salah satunya adalah memanfaatkan media massa sebagai alat utama untuk menyebarkan informasi tentang partai, visi-misi, dan program-program yang mereka tawarkan kepada pemilih. Mereka juga aktif melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat melalui pertemuan terbuka, dialog, kampanye *door-to-door*, dan kegiatan sosial lainnya. Selain itu, Partai Nasdem memiliki pola rekrutmen caleg yang unik, yaitu program O250, di mana mereka tidak hanya melihat pengalaman organisasi calon, tetapi juga potensi individu dalam

membangun hubungan dengan pemilih (Paloh, 2022). Pengalaman organisasi yang luas yang dimiliki Fauzan Sibron juga memberikan keunggulan dalam memahami dinamika politik lokal dan membangun jaringan yang kuat. Melalui kombinasi strategi komunikasi ini, Fauzan Sibron dan Partai Nasdem berhasil meraih dukungan yang signifikan dalam pemilihan umum.

Dalam era digital saat ini, teknologi informasi dan komunikasi memainkan peran penting dalam mempengaruhi pelaksanaan pemilihan umum DPRD Provinsi serentak pada tahun 2024. Calon DPRD Provinsi memanfaatkan media online, khususnya *Instagram*, sebagai alat untuk berkomunikasi dan menjangkau masyarakat. Di Indonesia, media sosial, terutama *Instagram*, telah berkembang pesat dan menjadi platform yang efektif untuk kampanye politik. Pemilih yang potensial dan aktif seringkali menggunakan *Instagram* sebagai saluran utama untuk mendapatkan informasi tentang pemilihan umum. Hal ini disebabkan oleh kemudahan akses, efisiensi biaya, jangkauan luas, dan ketersediaan informasi di media sosial. Berdasarkan observasi, pemilih aktif biasanya mencari dan membaca informasi tentang isu-isu politik, profil politisi, dan informasi tentang calon-calon yang akan maju dalam pemilihan umum melalui *Instagram*. Hal ini menunjukkan bahwa pemilih ingin selalu mendapatkan pembaruan tentang berbagai kegiatan, termasuk informasi baru dan penting tentang calon yang maju dalam pemilihan umum.

Dalam era digital saat ini, teknologi informasi dan komunikasi memainkan peran penting dalam mempengaruhi pelaksanaan pemilihan umum

DPRD Provinsi serentak pada tahun 2024. Calon DPRD Provinsi memanfaatkan media online, khususnya Instagram, sebagai alat untuk berkomunikasi dan menjangkau masyarakat. Di Indonesia, media sosial, terutama Instagram, telah berkembang pesat dan menjadi platform yang efektif untuk kampanye politik. Pemilih yang potensial dan aktif seringkali menggunakan Instagram sebagai saluran utama untuk mendapatkan informasi tentang pemilihan umum. Hal ini disebabkan oleh kemudahan akses, efisiensi biaya, jangkauan luas, dan ketersediaan informasi di media sosial. Berdasarkan observasi, pemilih aktif biasanya mencari dan membaca informasi tentang isu-isu politik, profil politisi, dan informasi tentang calon-calon yang akan maju dalam pemilihan umum melalui Instagram. Hal ini menunjukkan bahwa pemilih ingin selalu mendapatkan pembaruan tentang berbagai kegiatan, termasuk informasi baru dan penting tentang calon yang maju dalam pemilihan umum.

Namun, belum banyak penelitian yang secara spesifik meneliti penggunaan media sosial dalam kampanye politik di tingkat lokal, terutama dalam konteks pemilihan legislatif DPRD Provinsi. Data pendukung menunjukkan bahwa semakin banyak politisi yang memanfaatkan media sosial dalam kampanye mereka. Berdasarkan survei terbaru dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2023, sekitar 67% dari politisi di Indonesia menggunakan media sosial sebagai salah satu alat utama kampanye mereka, sementara 33% lainnya masih mengandalkan metode kampanye konvensional seperti pertemuan tatap muka dan iklan di media

massa tradisional. Fauzan Sibron merupakan salah satu dari banyak politisi yang berhasil memanfaatkan kekuatan media sosial untuk memenangkan pemilihan.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap strategi komunikasi politik dan penggunaan media dalam memenangkan pemilihan Legislatif ada tahun 2024, dengan studi kasus Fauzan Sibron dalam memenangkan pemilihan legislatif Provinsi Lampung. Pemilihan judul ini dipilih karena dua alasan utama. Pertama, Fauzan Sibron adalah figur politik yang sukses dalam memenangkan pemilihan umum dengan perolehan suara terbanyak pada dapil tersebut dari semua calon dan semua partai di Provinsi Lampung. Kedua, penelitian ini menyoroti peran penting strategi komunikasi politik dan media dalam meraih dukungan publik dan memenangkan pemilihan umum, sehingga judul tersebut mencerminkan fokus dan tujuan penelitian secara jelas dan tajam. Dengan menganalisis strategi yang diterapkan oleh Fauzan Sibron dan penggunaan media dalam proses tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga dalam memahami dinamika politik lokal dan faktor-faktor yang memengaruhi hasil pemilihan kepala daerah pada tahun 2024, khususnya di Provinsi Lampung.

1.2. Identifikasi Masalah

Dalam konteks pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia, untuk berhasil dalam sebuah pemilihan umum, peserta harus mendapatkan suara mayoritas. Hal ini menuntut setiap calon, termasuk Fauzan Sibron, yang mengambil bagian

dalam pemilihan untuk berupaya memperoleh dukungan sebanyak mungkin dari pemilih. Pada pemilihan umum DPRD Provinsi Lampung 2024, di mana Fauzan Sibron berhasil meraih kemenangan, tentu saja ia beserta tim kampanye dan Partai Nasdem mengimplementasikan strategi-strategi yang efektif. Namun, ada beberapa faktor penghambat yang dirasakan oleh Fauzan Sibron, seperti calon lain yang memiliki basis dukungan yang kuat dan mendapat dukungan dari berbagai partai, menjadi faktor yang harus dihadapi oleh Fauzan Sibron dan timnya.

Inovasi dari penelitian ini adalah penelitian yang berfokus pada strategi komunikasi politik yang memanfaatkan penggunaan media sosial dalam pemilihan umum.

Pembatasan waktu dan tempat penelitian disebabkan oleh waktu kerja dan kuliah penulis yang padat dan tempat penelitian yaitu Provinsi Lampung. Penulis memerlukan 7 jam perjalanan jika ingin meneliti kasus ini. Sedangkan penulis lebih banyak menetap di Jakarta. Pembatasan pada subjek dan objek penelitian adalah informan yang diperlukan adalah informan yang sibuk dan padat jadwal kegiatannya.

1.3.Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana Fauzan Sibron memanfaatkan media sosial secara efektif dalam kampanye politiknya untuk Pemilihan Legislatif DPRD Provinsi Lampung 2024?

2. Bagaimana penggunaan media sosial dibandingkan dengan media massa tradisional dalam mendukung kemenangan Fauzan Sibron?
3. Faktor apa saja yang membuat strategi komunikasi politik Fauzan Sibron lebih efektif dibandingkan calon lainnya yang tidak menggunakan media sosial?

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi komunikasi politik yang digunakan oleh Fauzan Sibron untuk memenangkan Pemilihan Legislatif DPRD Provinsi Lampung 2024, dengan fokus pada pemanfaatan media sosial dalam interaksi dan pengaruh terhadap masyarakat dan calon pemilih. Penelitian akan menganalisis metode komunikasi yang diterapkan, pesan-pesan yang disampaikan kepada pemilih, serta penggunaan media sosial dibandingkan dengan media massa tradisional dalam mendukung kampanye politiknya. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat mengidentifikasi pola-pola strategi yang berhasil atau kurang berhasil, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan strategi tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan mendalam mengenai dinamika politik di Provinsi Lampung dan menyediakan rekomendasi untuk perbaikan strategi komunikasi politik di masa mendatang.

1.5. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan pengetahuan tentang strategi komunikasi politik dan penggunaan media, serta memberikan manfaat yang berkelanjutan dalam bidang pendidikan, khususnya bagi jurusan Ilmu Komunikasi dan Ilmu Politik. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan penting bagi penelitian-penelitian selanjutnya dalam Ilmu Komunikasi maupun Ilmu Politik terkait strategi komunikasi politik dan penggunaan media dalam konteks pemilihan umum. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana strategi komunikasi politik berubah dan beradaptasi dalam konteks pemilihan umum. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi sumber referensi yang berharga dalam penyusunan dan penerapan strategi komunikasi politik dan media yang efektif pada pemilihan umum di masa depan.